

Bangun Solidaritas, Selamatkan Tradisi **SUKU DAYAK**

Kisah Sukses Credit Union Pancur Kasih, Pontianak, Kalimantan Barat



Dipersiapkan oleh :



Bangun Solidaritas, Selamatkan Tradisi SUKU DAYAK

Kisah Sukses Credit Union Pancur Kasih, Pontianak, Kalimantan Barat

PENULIS

Marcell D Lodo

Yusuf

Yosef Lejo Ngo

REVIEWER

Yeni Indra

EDITOR

Redhi Setiadi

BANGUN SOLIDARITAS, SELAMATKAN TRADISI SUKU DAYAK

Kisah Sukses *Credit Union* Pancur Kasih, Pontianak ,Kalimantan Barat

Penulis

Marcell D Lodo
Yusuf
Yosef Lejo Ngo

Reviewer

Yeni Indra

Editor

Redhi Setiadi

Desain & Cover

Wahyu Kokkang

Layout

Imam Afsori

Penerbit

CESS & JPIP

Percetakan

Nailil Printika

Cetakan I

Maret 2005

ISBN

979-3320-15-x

Buku ini dilindungi Undang-Undang Hak Cipta.
Segala bentuk penggandaan, reproduksi harus seizin penerbit

SAMBUTAN DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH DEPDAGRI

SEBAGAI suatu upaya untuk meningkatkan kapasitas aparat Pemerintah Daerah terutama dalam rangka mendukung kebijakan otonomi daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) telah menyusun program Regional Development Policies for Local Government (RDPLG). Melalui program ini, telah dilakukan berbagai upaya untuk merubah pola pembangunan daerah kearah pembangunan yang lebih partisipatif dan koordinatif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerbitkan beberapa seri *textbook* tentang Pembangunan Daerah.

Ditengah-tengah miskinnya keberadaan buku yang mengulas secara khusus tentang pembangunan daerah, maka pembuatan *textbook* ini diharapkan dapat memberikan *energi* baru, baik bagi pihak-pihak yang langsung berkecimpung dalam pengelolaan pembangunan daerah khususnya aparat daerah, maupun bagi para pemerhati masalah-masalah pembangunan daerah dalam mengkaji masalah-masalah pembangunan daerah. Selain itu, sebagaimana tujuan utama dari program RDPLG, keberadaan *textbook* pembangunan daerah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan perilaku birokrasi yang mampu menciptakan pola pengelolaan pembangunan daerah yang lebih partisipatif dan koordinatif.

Buku *textbook* ini terdiri dari 8 (delapan) seri yang substansinya merupakan perpaduan antara pengalaman empiris pengelolaan pembangunan di Indonesia dan pengelolaan pembangunan di Jepang. Adapun judul masing-masing seri adalah sebagai berikut :

Textbook 1: Konsep Pembangunan Partisipatori dan Kerjasama Antar Daerah - Suatu Pendekatan Pembangunan Daerah di Indonesia-

Textbook 2: Pembangunan Daerah di Jepang - Pengalaman-pengalaman yang Dapat Diaplikasikan di Negara Berkembang -

Textbook 3: Gerakan One Village One Product (OVOP) -Suatu Upaya Revitalisasi Daerah di Jepang-

Textbook 4: Best Practice Cases - Kompilasi Praktek-praktek Pembangunan yang Dinilai Berhasil -

Textbook 5: Pembangunan Daerah Melalui Penerapan Konsep "Lokalogi"

Textbook 6: Pendekatan Partisipatif dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Textbook 7: SISDUK: Sistem Dukungan untuk Pembangunan Partisipatoris (Suatu Pengalaman Pembangunan Kabupaten Takalar)

Textbook 8: How JICA Supported Promotion of Regional Development in West Kalimantan

Semoga Seri *Textbook* Pembangunan Daerah ini dapat memberikan sumbangan positif bagi peningkatan kualitas pengelolaan pembangunan daerah di Indonesia.

Jakarta, Maret 2005

DIREKTORAT JENDERAL BINA
PEMBANGUN DAERAH

KATA PENGANTAR

SERI Textbook ini merupakan suatu hasil dari Proyek Kerjasama Teknis untuk Proyek Regional Development Policies for Local Government (Proyek RDPLG) antara JICA dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri bersama Bappeda Sumatera Utara, Kalimantan Barat dan 5 provinsi se-Sulawesi, yang dilaksanakan sejak April 2001 hingga Maret 2005.

Berkaitan dengan Term of Reference (TOR), semua kegiatan dikonsentrasikan untuk peningkatan kapasitas manajemen pada Pemerintah Pusat dan Daerah agar dapat mempromosikan pembangunan daerah dengan inisiatif lokal.

Ada 8 macam textbook untuk pembangunan daerah. Textbook No. 1 menjelaskan konsep dasar pembangunan daerah yang dipersiapkan pada Proyek RDPLG, Textbook No. 2 merupakan terjemahan dari kegiatan utama JICA mengenai “Pembangunan Masyarakat yang Aplikabel bagi Negara Berkembang”, yang merupakan pokok dari pengalaman pembangunan daerah Jepang, dan Textbook No. 3 adalah ringkasan penting dari Gerakan Satu Desa Satu Komoditas Oita. Textbook No. 4 merupakan 70 kasus sukses dari kegiatan pembangunan daerah di Indonesia. Kemudian Textbook No. 5 dan No. 6 adalah ringkasan penting dari pendekatan praktis Lokalogi dan Participatory Rural Appraisal (PRA) yang bertujuan untuk penggalian fakta yang efektif. Textbook No. 7 merupakan penjelasan pengantar pendekatan partisipatori yang dikembangkan di Kabupaten Takalar,

Sulawesi Selatan dengan bantuan JICA, dan Textbook terakhir No. 8 menjelaskan konsep manajemen dengan model Konsep Pembangunan Kalimantan Barat.

Kami berterima kasih kepada seluruh anggota tim Proyek RDPLG, counterpart di Bangda dan Bappeda 7 provinsi, sumber daya dari luar yang bersama-sama bekerja keras untuk meningkatkan kegiatan, dan staf pada AKLN/Depdagri, staf JICA Indonesia dan tim dari Proyek HRDLG/JICA, yang mendukung kami selama empat tahun.

Kami mengharapkan textbook ini akan dimanfaatkan secara efektif oleh seluruh stakeholder, khususnya dari staf dari pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan promosi kegiatan ekonomi dengan inisiatif lokal.

Jakarta, Januari 2005

**Hisao Tanimoto
Yasunori Minagawa
Noboru Fujimoto
Hiroyuki Sakuma
Proyek RDPLG / JICA**

Sambutan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Depdagri	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Singakatan	vi
Bab 1	
Makmur di Hutan, Miskin karena Uang	I
Bab 2	
Tumbuhkan Kepemilikan, Anggota Mencari anggota	15
Bab 3	
Koperasi Berprestasi Sarana Rekonsiliasi	23
Bab 4	
Berdayakan Pemimpin Agama dan Tokoh Adat	33
Bab 5	
Bukan Lagi Milik Masyarakat Dayak	39
Lampiran 1: Profil RDPLG Project	45
Lampiran 2: JICA Team & Counterpart	46

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN

AMA	: Aliansi Masyarakat Adat
BK3D	: Badan Koordinasi Koperasi Kredit Daerah
BK3I	: Badan Koordinasi Koperasi Kredit Indonesia
BPR-PB	: Bank Perkreditan Rakyat Pancur Benua
BPSE-KAP	: Biro Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Pontianak
CU	: <i>Credit Union</i>
CUKB	: <i>Credit Union</i> Khatulistiwa Bakti
CUPK	: <i>Credit Union</i> Pancur Kasih
DI	: Dayakologi Institute
Kanwil	: Kantor Wilayah
KPD	: Koperasi Pancur Dangeri
LBBT	: Lembaga Bela Benua Talino
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
PEK	: Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
PPSDAK	: Program Pengembangan Sumber Daya Alam Kerakyatan
PSE-KAP	: Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Agung Pontianak
RAT	: Rapat Anggota Tahunan
SHK	: Sistim Hutan Kerakyatan
SHU	: Sisa Hasil Usaha
SSPK	: Serikat Segerak Pancur Kasih
TKW	: Tenaga Kerja Wanita
TP	: Tempat Pelayanan
YKSPK	: Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih

BAB 1

MAKMUR DI HUTAN, MISKIN KARENA UANG

EKSPLOITASI hutan yang tak terkontrol mengguratkan kisah sedih bagi masyarakat Dayak. Tempat tinggal mereka terkoyak, mereka pun semakin terkucil dan terbelakang dalam pembangunan Kalimantan Barat secara umum. Padahal, jumlah suku Dayak yang dominan merupakan potensi tersendiri dalam pengembangan dan pemberdayaan tradisi yang melekat di dalamnya.

Kerusakan hutan memang berdampak langsung terhadap masyarakat Dayak yang memiliki keterikatan dan ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam. Sejak 1950-an, kehidupan masyarakat Dayak memang lebih akrab dengan alam dan jauh dari kebisingan luar. Kondisi hutan yang masih terjaga membuat sumber kehidupan begitu mudah diperoleh. Hasil panen yang berlimpah, sayur, dan lauk tersedia di alam sekitar.

Setiap kampung kelompok masyarakat Dayak mempunyai wilayah hutan sendiri. Setiap kampung mempunyai sumber kehidupan sendiri-sendiri. Tingginya solidaritas antarmasyarakat menyebabkan beban setiap orang menjadi ringan. Hubungan masyarakat diatur oleh norma-norma yang jelas dan tegas. Baik itu menyangkut hubungan antarmasyarakat, masyarakat dengan alam dan masyarakat dengan Yang Maha Kuasa (Jubata). Keharmonisan antara manusia dan alam menjadi ciri aktivitas keseharian kelompok masyarakat ini.

Tapi, kondisi tersebut berubah bersamaan dengan mulai masuk pengaruh luar pada tahun 70-an. Upaya eksploitasi kayu hasil hutan

secara besar-besara menjadi aktivitas yang terus merongrong kehidupan masyarakat Dayak. Keberadaan hutan yang terkait erat dengan pola hidup masyarakat Dayak semakin mengalami kerusakan.

Akibatnya, kebiasaan dan tradisi masyarakat Dayak mulai berubah, terpengaruh budaya luar. Mereka tak lagi bisa menggatungkan sumber kehidupannya dari hasil hutan, keharmonisan kehidupan suku ini dengan alam hanyalah tinggal cerita.

Kehidupan yang asri berubah menjadi cerita mengenai pencurian kayu, perampasan tanah adat, pembangunan yang dijanjikan tak kunjung tiba, anak gadis mereka yang dihamili oleh para penjarah kayu, penghasilan yang semakin rendah, sulitnya menjual hasil usaha, paceklik yang menghantui setiap tahun, ketidakmampuan membiayai pendidikan anak, adanya oknum yang menteror, ataupun keharusan membongkar rumah bentang. Masyarakat Dayak tidak berdaya menghadapi itu semua. Mereka terpaksa tidak hanya mengorbankan harta benda, tapi juga nilai budaya tinggi yang dimiliki.

Hilangnya adat Dayak menyebabkan hak kepemilikan atas hutan tidak diakui masyarakat Dayak sejak saat itu hampir sirna di tempat asalnya sendiri. Masyarakat umum kemudian cenderung melihat masyarakat Dayak sebagai masyarakat yang identik dengan keterbelakangan, kebodohan, dan tidak beradat. Pandangan ini berpengaruh besar terhadap sikap dan pandangan masyarakat Dayak sendiri.

*Hilangnya adat
Dayak
menyebabkan hak
kepemilikan atas
hutan tidak diakui*

Kondisi ini menjadi salah satu faktor penghambat pengembangan diri masyarakat Dayak pada umumnya. Kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi semakin terpuruk, pendapatan sudah tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan. Kemampuan ekonomi masyarakat yang semakin terbatas ini kemudian menyebabkan banyak anak-anak usia sekolah meninggalkan bangku sekolah dan membantu orang tua bekerja sebagai buruh di perkebunan. Sedangkan anak-anak wanita lebih banyak bekerja menjadi pembantu rumah tangga di kota maupun menjadi TKW ilegal ke Malaysia.

Berbagai keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi terutama menyangkut penyediaan dana menjadi masalah yang harus dihadapi secara terus-menerus. Keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal menyebabkan mereka hanya dapat bergantung pada hasil yang mereka peroleh dari usaha tanpa ada peluang pengembangan. Sementara pelayanan lembaga keuangan juga belum menyentuh masyarakat Dayak yang berada di wilayah pedesaan. Lembaga keuangan hanya ada di kota-kota Kabupaten.

Pada tahun 70-an, BK3I mulai memperkenalkan sistem keredit union sebagai salah satu bentuk lembaga perkreditan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan pengembangan. Pengenalan sistem kredit inilah yang kemudian menjadi ide dasar pengembangan Kredit Union oleh Yayasan Pancur Kasih.

Keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal menyebabkan mereka hanya dapat bergantung pada hasil yang mereka peroleh dari usaha tanpa ada peluang pengembangan

I. MERDEKA DENGAN PENDIDIKAN

Sebagai citra Ilahi, semua manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama agar mampu mengatasi masalah yang dihadapi dan membuat hidup lebih terhormat. Marjinalisasi terhadap masyarakat Dayak pada era rezim Orde Baru begitu kuat. Tekanan tersebut hanya dapat dilawan dengan kesadaran kritis yang bisa tumbuh hanya melalui pendidikan.

Dengan kesadaran tersebut, AR Mecer yang merupakan keturunan Dayak Krio dari Ketapang, melihat perlunya membentuk suatu lembaga keuangan dengan akses yang mudah. Rendahnya akses ke lembaga keuangan membuat sumber keuangan, terutama untuk modal usaha, menjadi terbatas.

Masyarakat Dayak pada umumnya mengalami kesulitan dalam membiayai pendidikan anaknya. Pendapatan mereka yang masih minim dan ketersediaan fasilitas pendidikan hanya ada di kota membuat semua itu hanya di angan-angan. Lembaga keuangan mikro dapat dijadikan alternatif sumber pendanaan pendidikan yang dibutuhkan masyarakat Dayak. Akses ini diharapkan dapat memperbaiki tingkat pendidikan pada umumnya

Selain akses yang mudah, pengedepanan aspek pendidikan dalam kegiatan lembaga keuangan tersebut juga menjadi aspek penting untuk mengubah pandangan dan kebiasaan negatif masyarakat Dayak pada umumnya. AR Mecer melihat pendidikan sebagai faktor mendasar dalam pengembangan pribadi-keluarga dan masyarakat. Pendidikan dijadikan

*Masyarakat Dayak
pada umumnya
mengalami
kesulitan dalam
membiayai
pendidikan
anaknya*

sebagai upaya penyadaran masyarakat.

Ekonomi masyarakat Dayak terpuruk akibat tidak lagi memegang teguh nilai-nilai kearifan tradisi. Karena itu, AR Mecer merasa perlu mengembalikan nilai – nilai kebersamaan (nilai solidaritas), kemandirian, dan nilai keswadayaan yang sebelumnya menjadi bagian utama masyarakat Dayak.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek di atas, sistem Kredit Union dilihat sebagai salah satu sistem yang dapat banyak mengakomodasi berbagai kebutuhan dan peluang tersebut. Keterlibatan AR Mecer dalam program pengembangan CU di Kalimantan Barat menjadi latar belakang utama pengembangan CU sebagai bentuk pemecahan berbagai masalah dan keterbatasan yang dialami masyarakat Dayak. Sistem yang digunakan dalam kredit union dilihatnya dapat membantu membuka akses keuangan sekaligus menjadi sarana pendidikan bagi anggotanya.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas 146.807 Km² dengan jumlah penduduk 3,79 juta jiwa dan 40% dari jumlah penduduknya merupakan suku Dayak yang merupakan suku dominan. Sisanya adalah penduduk Melayu, Tionghoa, dan pendatang lainnya. Luasnya kawasan hutan di wilayah ini menjadikan hasil hutan berupa kayu menjadi sumber daya utama primadona pendapatan daerah Kalimantan Barat. Komoditas perkebunan seperti karet, lada, coklat dan kopi menjadi komoditas potensial ekspor yang sebagian besar dikelola sebagai perkebunan rakyat. Kalimantan Barat juga menyimpan potensi tambang seperti

*Ekonomi
masyarakat Dayak
terpuruk akibat
tidak lagi
memegang teguh
nilai-nilai kearifan
tradisi*

emas, batubara, dan boksit yang sebagian besar belum tereksplorasi.

Dari sektor pertanian kondisi lahan di beberapa wilayahnya menjadi potensi pengembangan tanaman hortikultura potensial seperti jeruk dan tanaman buah lainnya. Kondisi alam yang sangat beragam seperti pantai dan gunung memiliki potensi wisata yang cukup besar.

Belum intensifnya budidaya tanaman pertanian dan perkebunan yang dilakukan menyebabkan rendahnya tingkat produktivitas dan hasil pertanian. Hal yang sama juga terjadi pada lingkup usaha non pertanian. Kondisi ini menjadi faktor utama penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan kelompok masyarakat ini pada umumnya.

Sebagai suku asli Kalimantan Suku Dayak tersebar hampir di seluruh wilayah geografis Kalimantan Barat. Tidak sedikit di antaranya yang masih bermukim di wilayah-wilayah yang masih terisolasi seperti di balik-balik bukit, di lereng gunung, pinggiran hutan atau pinggiran sungai. Dengan kondisi tersebut, pemerataan pembangunan di bidang pendidikan tidak sampai kepada masyarakat Dayak. Sarana pendidikan terbatas, guru-guru enggan bertugas di kampung Masyarakat Dayak yang terpencil. Pelayanan pendidikan lebih banyak dilakukan oleh para misionaris baik itu dari gereja Katolik maupun gereja Protestan.

Pengaruh dari gereja tersebut menyebabkan mayoritas masyarakat Dayak memeluk agama Kristen. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, air hanya

*Belum intensifnya
budidaya tanaman
pertanian dan
perkebunan yang
dilakukan
menyebabkan
rendahnya tingkat
produktivitas dan
hasil pertanian*

mejangkau pesisir jalan raya, sedangkan di pedalaman belum tersentuh. Adapun jalan yang dibangun di beberapa kampung biasanya hanya untuk kepentingan investor baik untuk mengambil hasil hutan maupun yang mengembangkan perkebunan

2. BAGAIMANA SI MISKIN MEMBANTU DIRINYA?

Tumbuh dan berkembangnya budaya konsumtif, tapi tidak dibarengi tingkat pendapatan yang memadai, justru menyebabkan keterbelakangan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat Dayak. Kondisi ini harus dihilangkan agar dapat hidup lebih baik dengan pendapatan yang serba terbatas.

Kebiasaan orang tua menyimpan padi di lumbung atau beras di tempayan, dengan maksud agar selalu ada persediaan, harus kembali dilestarikan. Kebiasaan hidup boros harus bisa diredam.

Keberadaan lembaga keuangan yang dapat membantu menyediakan kredit ringan untuk kegiatan konsumsi seperti pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat membantu meningkatkan kondisi sumber daya manusia masyarakat Dayak. Sasaran yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat Dayak yang ada di pedesaan. Kebiasaan yang kurang baik perlu diarahkan kepada tindakan-tindakan yang bijak dalam pengelolaan ekonomi. Masyarakat Dayak juga tidak dilihat sebagai kelompok yang miskin dan tidak berdaya, tetapi harus dipandang sebagai kelompok yang punya potensi luar biasa jika dioptimalkan.

Kebiasaan orang tua menyimpan padi di lumbung atau beras di tempayan, dengan maksud agar selalu ada persediaan, harus kembali dilestarikan

4. LEMBAGA-LEMBAGA PENDUKUNG

Pengembangan gagasan sepenuhnya dilakukan kalangan staf dan pengurus Yayasan Pancur Kasih secara bertahap dan besinambungan. Yayasan ini merupakan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan –dan memiliki perhatian terhadap kondisi masyarakat Dayak. Aktivitas dalam bentuk berbagai program pengembangan pendidikan telah membuat lembaga ini semakin sadar akan keterbatasan dan kesulitan yang dialami masyarakat Dayak.

Hal ini menjadi pendorong Pancur Kasih sebagai sebuah yayasan untuk terus konsisten mengembangkan dan memperbaiki kondisi tersebut. Caranya dengan membangun solidaritas masyarakat Dayak menggunakan nilai-nilai dan kearifan lokal suku Dayak.

Badan Koordinasi Koperasi Kredit Indonesia (BK3I) adalah lembaga yang aktif dalam pengembangan berbagai bentuk koperasi kredit di tingkat nasional. Lembaga ini banyak aktif dalam upaya identifikasi bentuk koperasi kredit yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal.

Salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh BK3I selama periode tahun 70-an adalah pengenalan dan pengembangan lembaga perkreditan rakyat dalam bentuk kredit union. Lembaga pendukung lainnya, PSE-KA (Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Agung Pontianak) merupakan salah satu lembaga keagamaan yang banyak terlibat langsung.

Secara tidak langsung, gagasan juga mendapat dukungan dari CU (credit union)

*Pengembangan
gagasan
sepenuhnya
dilakukan kalangan
staf dan pengurus
Yayasan Pancur
Kasih secara
bertahap dan
besinambungan*

Khatulistiwa Bakti (CUKB) yang saat itu menjadi laboratorium CU di Pontianak. Sebagian dari aktivis YKSPK (Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih) merupakan anggota bahkan pengurus CUKB sehingga pengembangan gagasan CU Pancur Kasih lebih mudah.

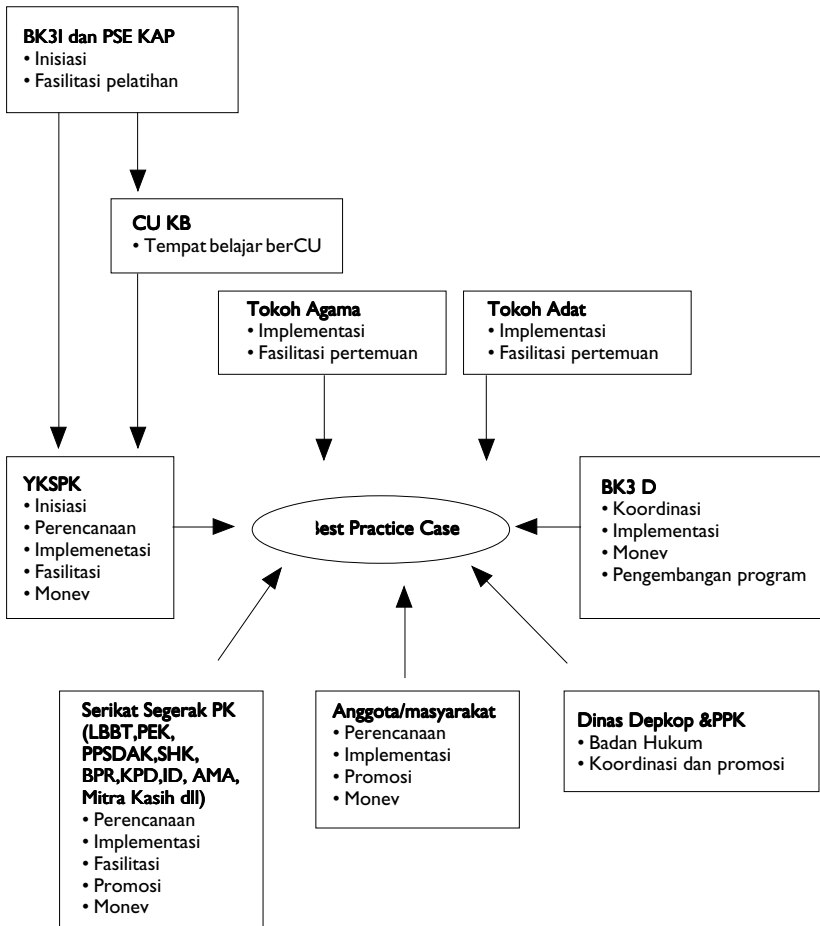
4. KRONOLOGI KASUS DAN IDENTIFIKASI PERAN AKTOR

Tahun	Aktor	Aktivitas	Dampak (positif/negatif)	Isu Baru
1985	Biro Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Pontianak (BPSE-KAP)	• menyelenggarakan pelatihan tentang CU	• Beberapa aktivis YKSPK memahami CU	• Berdiri CU KB sebagai tempat belajar
1985	Badan Koordinasi Koperasi Kredit Indonesia (BK3I)	• Memberi pelatihan tentang CU • Mempromosikan CU kepada kelompok basis	• Beberapa aktivis YKSPK memahami CU	• Berdiri CU KB sebagai tempat belajar
1985	CU Khatulistiwa Bakti (CUKB)	• Menjadikan laboratorium CU di Pontianak • Intensif mendidik anggota sesuai prinsip CU	• Pengurus dan Staf YKSPK menjadi anggota CU • Semakin memahami CU dalam praktek	• Ingin mereplikasi model di kalangan sendiri
1987	Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih (YKSPK)	• Sosialisasi ide kepada pengurus dan staf YKSPK • Rapat pembentukan • Fasilitasi fasilitas tempat dan operasional	• Berdirinya CU Pancur Kasih	• Memperkuat pemodal di kalangan sendiri
1988	Tokoh agama	• Fasilitasi pertemuan dengan masyarakat	• Mengumpulkan masyarakat/umat.	• Membangun ekonomi umat
1988	Tokoh Adat	• Fasilitasi pertemuan dengan masyarakat	• Bisa mengumpulkan masyarakat untuk pertemuan	• Membangun ekonomi masyarakat
1993	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEK)	• Mengadakan pendidikan CU kepada masyarakat	• Promosi dan mengembangkan CU.	• Menumbuhkan kebangkitan jiwa kewirausahaan
1993	Serikat Segerak Pancur Kasih (SSKP)	• Pemberdayaan Masyarakat	• Promosi CU	• Solidaritas Masyarakat Dayak
1993	Program Pengembangan Sumber Daya Alam Masyarakat ((PPSDAK)	• Melakukan pemetaan	• Promosi CU	• Pengakuan hak rakyat
1993	Lembaga Bela Benua Talino (LBTT)	• Advokasi di bidang hukum adat	• Promosi CU	• Perlindungan hak masyarakat

Tahun	Aktor	Aktivitas	Dampak (positif/negatif)	Isu Baru
1991	Instituts Daya-kologi (DI)	• Penggalan budaya Dayak	• Promosi CU	• Mengangkat budaya masyarakat Dayak
1993	Sistim Hutan Kerakyatan (SHK)	• Mendampingi masyarakat dalam pengelolaan hutan	• Promosi CU	• Pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat
1994	Koperasi Pancur Dangeri (KPD)	• Penguatan ekonomi Masyarakat • Pelatihan tentang koperasi	• Promosi dan mitra CU	• Membangun ekonomi berbasis masyarakat
1994	Percetakan Mitra Kasih	• Percetakan • Publikasi	• Publikasi dan promosi CU	• Publikasi masyarakat Dayak
1992	Bank Perkreditan Rakyat Pancur Benua (BPR-PB)	• Penyaluran Kredit	• Promosi dan mitra	
1993	Aliansi Masyarakat Adat (AMA)	• Perjuangan hak adat	• Promosi CU	• pemberdayaan adat
1990-	Badan Koordinasi Koperasi Kredit Daerah (BK3D)	• Mengkoordinasi kegiatan CU agar konsisten dengan pengelolaan CU	• Koordinir gerakan CU	• Membangun gerakan CU yang lebih cepat
1993	Kanwil Depkop dan PPK Propinsi Kalimantan Barat	• Memberi izin Badan Hukum Koperasi	• Ada badan Hukum CU	• Ada pengakuan dari pemerintah

5. GAMBAR KETERKAITAN ANTAR-AKTOR

Lembaa/ stake holder yang terlibat dalam pengembangan program CU dari proses pemunculan ide sampai berkembang sekarang ini adalah Biro Pengembangan Sosial Keuskupan Agung Pontianak (PSE-KAP), Badan Koordinasi Koperasi Kredit Indonesia (BK3I) Badan Koordinasi Koperasi Kredit Daerah (BK3D), Serikat Segerak Pancur Kasih dengan unit Pogramnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemerintah melalui instansi teknis. Berikut keterkaitan antar-aktor yang terlibat.



6. INISIASI GAGASAN

Awal pengembangan gagasan dilakukan AR Mecer di dalam lingkungan Yayasan Pancur Kasih sendiri. Perbaikan kondisi ekonomi dan keuangan dalam lingkungan Yayasan Pancur Kasih menjadi perhatian utama. Kredit union dikembangkan untuk mengatasi masalah keuangan yang sering dihadapi yayasan ini dalam memenuhi kebutuhan aktivitas organisasi maupun pengurus.

Upaya sosialisasi gagasan pengembangan kredit union dilakukan dengan pendekatan individu/ perorangan pengurus dan aktivis Yayasan Pancur Kasih. Gagasan ini mendapatkan respons positif karena sejalan dengan tujuan kegiatan lembaga yang banyak bergerak di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.

Selanjutnya, melalui keputusan bersama pengembangan kredit union Pancur Kasih dijadikan salah satu bagian program kerja Yayasan Pancur Kasih. Pengembangan kelembagaan kredit union Pancur Kasih dimulai dengan menerapkan prinsip-prinsip kelembagaan CU yaitu pendidikan, keswadayaan dan solidaritas.

Pengembangan pengetahuan tentang koperasi dan khususnya kredit union dilakukan dengan pelatihan formal maupun penjelasan informal secara intensif oleh staf yang telah menguasai masalah tersebut. Pendirian koperasi kredit union Pancur Kasih dengan semboyan “*Anda pasti bisa jika Anda pikir bisa*” dan “*Berani bertindak jaya*”.

Tanggapan-tanggapan tersebut kemudian

*Upaya sosialisasi
gagasan
pengembangan
kredit union
dilakukan dengan
pendekatan
individu/
perorangan
pengurus dan
aktivis Yayasan
Pancur Kasih*

dipetakan untuk selanjutnya membuat strategi pendekatan yang akan dilakukan. Monitoring dan evaluasi selalu dilakukan untuk mengetahui perkembangan respons masyarakat terhadap gagasan oleh YKSPK secara kelembagaan maupun secara kelompok.



INISIATOR: Sebagai orang Dayak, AR Mecer (kiri) tergerak untuk menyelamatkan tradisi Suku Dayak melalui Yayasan Pancur Kasih.

7. TRAUMA TERHADAP KOPERASI

Sebagai hal yang masih baru di kalangan masyarakat Kalimantan Barat, pengetahuan tentang sistem (manajemen dan pengorganisasian) kredit union masih sangat terbatas. Pengembang gagasan kemudian berupaya mencari dan mengumpulkan berbagai informasi tentang kredit union terutama dari lembaga-lembaga yang memang banyak terlibat dengan masalah kredit union. Lembaga-lembaga tersebut antara lain adalah CUKB, BK3I, dan BK3D.

Informasi yang diperoleh kemudian dikembangkan sendiri di dalam yayasan.

Dengan begitu, pengetahuan tentang CU dapat ditingkatkan secara intensif di kalangan staf dan pengurus Yayasan Pancur Kasih.

Mendengar kata koperasi, masyarakat di sana cenderung pesimistis. Sudah banyak koperasi yang pernah dibentuk, tapi tidak ada yang berhasil. Hal inilah yang menjadi alasan ketidaksetujuan mereka. Koperasi sering dikaitkan sebagai alat intervensi pemerintah.

Karena itulah, para pelaksana kegiatan memutuskan untuk tidak menggunakan istilah koperasi. Dicarilah istilah lain yang prakteknya tetap menerapkan prinsip koperasi. Namanya kredit union yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan CU. Istilah Credit Union (CU) lebih diterima oleh calon anggota waktu itu karena lebih mengutamakan aspek pendidikan, solidaritas, dan kemandirian.

BAB 2

TUMBUHKAN KEPEMILIKAN, ANGGOTA MENCARI ANGGOTA

I. PROSES MOBILISASI SUMBER DAYA

I.a. Identifikasi Sumber Daya Pendukung (lokal/luar)

DENGAN pengurus dan staf YKSPK yang sebagian besar merupakan suku Dayak, lembaga ini memiliki kedekatan emosional. Itu menjadi aset tersendiri dalam berbagai program pembangunan masyarakat Dayak. Mereka bisa bena-benar memahami masalah yang ada dan kemudian mencari solusi. Kedekatan ini menjadi titik masuk (*entry point*) ke dalam lingkungan masyarakat. Dari sisi sumber daya manusia, staf dan pengurus yayasan menjadi bagian penting dalam proses pengembangan gagasan.

Sementara pengetahuan tentang CU harus diperoleh dari pihak-pihak luar, baik dari lembaga tingkat propinsi maupun nasional. Lembaga-lembaga tersebut di antaranya CUKB, BK3I, dan PSE-KAP.

YKSPK berperan dalam memobilisasi sumber daya dengan pendekatan sosialisasi intensif yang diikuti bentuk-bentuk pelatihan internal tentang sistem dalam CU dan upaya-upaya pengembangannya. Mereka masukannya sebagai bagian program kerja yang dituangkan dalam perencanaan kegiatan, penyusunan kepengurusan, dan pengalokasian dana pengembangan CU.

Sedangkan untuk CUKB, BK3I, dan PSE-KAP lebih banyak terlibat dalam upaya tidak langsung penyampaian berbagai informasi yang menyangkut sistem kredit union. Penyampaian informasi ini dilakukan dengan pemanfaatan keberadaan CUKB sebagai

laboratorium pengembangan CU di Kalimantan Barat.

Transfer pengetahuan dan informasi tentang pengembangan CU dilakukan baik secara formal dengan pelatihan maupun informal dengan melibatkan langsung staf atau pengurus Yayasan Pancur Kasih yang beberapa di antaranya adalah pengurus dalam kegiatan CUKB.

I.b. Hambatan dan Strategi Penyelesaian

Kendala yang paling utama adalah keterbatasan pengetahuan orang – orang yang terlibat mengenai CU. Ini menyebabkan proses pengembangan tidak bisa berjalan cepat. Harus dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan intensif secara berkala.

Kemudian masalah kedua, pada awal kegiatan sempat terhadap soal permodalan sebagai bagian penting dari kegiatan simpan-pinjam. Dana yayasan masih terbatas. Tapi, dengan memperkuat dan meningkatkan intensitas kegiatan penyimpanan di antara para anggota, secara bertahap masalah ini dapat diatasi. Upaya tersebut dilakukan dengan terus menanamkan kesadaran akan kebutuhan simpanan dalam pengembangan CU.

Kendala yang paling utama adalah keterbatasan pengetahuan orang – orang yang terlibat mengenai CU

2. PARTISIPASI MASYARAKAT

2.a Bentuk-Bentuk Partisipasi masyarakat

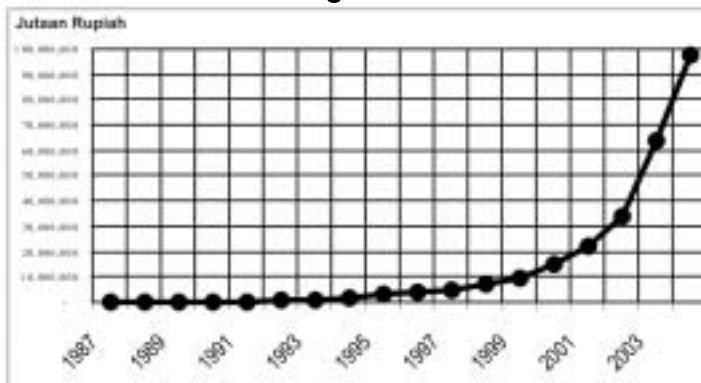
Penerapan prinsip dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota merupakan asas demokrasi sebagai bentuk kedaulatan anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Asas demokrasi ini sangat dijunjung tinggi CU

Pancur Kasih sebagai penghargaan terhadap harkat dan martabat anggota yang selalu dipandang sama dan setara.

Peran anggota sangat besar pengaruhnya dalam mengembangkan CU. Partisipasi anggota yang paling menonjol adalah dalam pengembangan aset dan permodalan CU yang sangat terkait dengan kemajuan atau perkembangan aktivitas CU. Pertumbuhan nilai aset CU merupakan bukti tingginya partisipasi anggota dalam menyimpan.

Kontribusi anggota dilakukan dalam bentuk berbagai simpanan seperti simpanan wajib, saham, iuran pendidikan, dana solidaritas, dana pembangunan gedung, dana solidaritas, ataupun *pangari* (gotong royong bergilir). Bentuk partisipasi dengan pengadaan dana secara swadaya berdampak kuat dalam menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kegiatan ini.

Grafik Perkembangan Aset CU Pancur Kasih



Secara aktif, anggota CU Pancur Kasih juga terlibat dalam sosialisasi kredit union dan pengembangan jumlah anggota. Dengan adanya rasa memiliki, mereka mempromosikan dan "menyadarkan" pentingnya CU kepada orang-orang terdekatnya. Mekanisme anggota mencari anggota sangat membantu dalam penambahan jumlah anggota. Tidak hanya sekadar membuat orang menjadi anggota, tapi juga berupaya membimbingnya menjadi anggota yang baik.

Mekanisme pencairan pinjaman juga melibatkan peran anggota. Keterlibatan anggota tersebut terutama dalam membantu menilai kelayakan pemohon yaitu dengan memberi informasi kondisi calon peminjam. Pemohon harus mendapatkan rekomendasi minimal dari 2 orang anggota lain sebagai penjamin, yang rumahnya berdekatan.

Selanjutnya, anggota yang menjadi penjamin ikut memonitor pengangsuran pinjaman. Istilahnya tanggung-renteng. Hasil dari sistem ini, tingkat kemacetan pinjaman bisa ditekan di bawah 5%. Anggota juga berpartisipasi dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Setiap anggota berhak tahu dan mengontrol kegiatan CU, termasuk menentukan pengurus.

Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), mereka mempunyai hak menyampaikan pendapat dan memberi saran demi kemajuan. Pengembangan produk yang dibuat pengurus dalam implementasinya perlu mendapat persetujuan anggota. Program kerja yang disusun pengurus juga harus men-

*Mekanisme
anggota mencari
anggota sangat
membantu dalam
penambahan
jumlah anggota*

dapatkan persetujuan dan pengesahan dari anggota. Pada akhir tahun, hasil kerja pengurus dipertanggungjawabkan kepada anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT).

2.b Peran Masing-Masing Aktor dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat

CU Pancur Kasih dapat dikatakan sebagai satu-satunya aktor yang mendorong partisipasi masyarakat. Penerapan berbagai mekanisme yang membuka peluang partisipasi anggota merupakan awal tumbuhnya rasa saling memiliki. Mekanisme anggota merekrut anggota, pendidikan anggota dan berbagai mekanisme lain yang bertujuan meningkatkan partisipasi anggota merupakan upaya konsisten yang dijaga dan dikembangkan CU Pancur Kasih.

Setiap anggota punya misi bagaimana mengajari orang, mengajak, membimbing, serta menjadikannya anggota CU. Tanggung jawab moral betul-betul dijalankan, tidak sekedar memasukannya tetapi juga bertindak sebagai penjamin. Solidaritas di antara sesama anggota dibangun supaya di antara sesama anggota terjadi proses saling mendidik, saling mengingatkan, dan saling membantu.

Partisipasi anggota dalam setiap gerakan CU merupakan gerakan kolektivitas pengurus dan anggotanya.

2.c. Hambatan dan Strategi Penyelesaian

Membangun kembali semangat berkolaborasi di masyarakat perlu kesabaran. Proses keanggotaan harus berdasarkan kesadaran bukan paksaan. Hal ini menjadi masalah utama

Tanggung jawab moral betul-betul dijalankan, tidak sekedar memasukannya tetapi juga bertindak sebagai penjamin

dalam pengembangan awal partisipasi masyarakat dalam kegiatan CU Pancur Kasih. Banyak masyarakat yang menjadi anggota hanya sekedarnya dan kemudian tidak aktif.

Kondisi ini diatasi dengan kegiatan pendidikan yang menjadi salah satu mekanisme utama dalam menumbuhkan kesadaran dan pengertian keanggotaan. Mekanisme pendidikan dasar I yang diberikan kepada calon anggota, dan pendidikan dasar lanjutan yang diberikan untuk anggota yang tidak aktif, telah menjadi jalan keluar efektif terhadap permasalahan tersebut.

Wilayah pengembangan CUPK adalah masyarakat Dayak di pedesaan. Sarana dan prasarana transportasi untuk menjangkau desa-desa masih sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan pelayanan belum bisa merata ke seluruh daerah. Kampung-kampung di balik bukit, di lereng-lereng gunung yang belum bisa dijangkau.

Kemampuan CUPK untuk melayani anggota di daerah juga masih sangat terbatas. Baik itu tenaga, biaya, maupun fasilitas. Daerah-daerah baru menuntut adanya pembinaan yang intensif supaya dapat tumbuh kesadaran dengan baik. Bagi CU-PK, permasalahan selalu di balik menjadi tantangan dan peluang.

Sebagai upaya mengatasi berbagai permasalahan di atas, CUPK melakukan pembinaan masyarakat melalui pengkaderan. Di setiap daerah dilakukan pengkaderan yang diharapkan dapat menjadi ujung tombak di lapangan. Misalnya, dengan menunjukan

*Wilayah
pengembangan
CUPK adalah
masyarakat Dayak
di pedesaan*

sejumlah tabungan, SHU yang diperoleh akhir tahun, serta kemudahan mendapatkan pinjaman .



2.d. Kunci Sukses dalam Peningkatan Partisipasi

Keberhasilan CU Pancur Kasih memobilisasi masyarakat hingga menjadi solid tak lepas dari pendidikan yang konsisten kepada anggota. Mereka menerapkan prinsip: dimulai dari pendidikan, dikembangkan dengan pendidikan, serta dikontrol juga melalui pendidikan.

CU Pancur Kasih bukanlah pengelolaan keuangan, tetapi tahapan pendidikan sebagai bentuk penyadaran yang diarahkan pada perubahan mental dan sikap masyarakat sasaran. CU juga bukan sekadar kegiatan simpan pinjam, tetapi lebih diutamakan sebagai proses penyadaran membangun nilai-nilai kemandirian dan solidaritas.

Pendidikan dasar sebagai tahap awal pengenalan CU memberi muatan: 60% materi membangun kesadaran, 30% tentang pengetahuan CU, dan 10 % berisikan kete-

rampilan teknis. Sesuai dengan misi YKSPK sejak awal untuk pemberdayaan masyarakat Dayak, kegiatan ini perlu mendapatkan dukungan.

Tahap-tahap awal pendekatan sosialisasi dilakukan melalui tokoh-tokoh agama dan tokoh adat. Mereka mempunyai pengaruh lebih baik ketimbang tokoh formal. Keterlibatan tokoh-tokoh agama dan adat sebagai kader di kampung diharapkan bisa mempengaruhi keluarga dan masyarakat lainnya untuk masuk menjadi anggota CU.

Sebab, belum semua masyarakat Dayak bisa menerima CU. Apalagi lembaga ini dikelola oleh orang-orang yang tinggal di Pontianak yang jauh dari desa. Mengeluarkan uang untuk menabung belum biasa dilakukan masyarakat. Uang yang dimiliki selalu kurang untuk membeli barang. Membangun kesadaran di kalangan masyarakat itulah yang memerlukan proses panjang.

Pendekatan dilakukan melalui orangper orang, kemudian membentuk kader-kader lokal dengan pendidikan. Melalui bukti yang dilakukan oleh beberapa orang, kemudian menular secara perlahan kepada yang lainnya. CU mulai menjadi bagian dari kehidupan beberapa desa dan menjadi kebanggaan.

BAB 3

KOPERASI BERPRESTASI SARANA REKONSILIASI

I. DARI SUDUT SEKOLAH KE SEANTERO NUSANTARA

Pada saat berdiri pada 1987, CU Pancur Kasih sebagai upaya pengembangan gagasan lembaga kredit, pelayanannya dikhususkan untuk pengurus dan staf Pancur Kasih. Upaya tersebut dijadikan sebagai sarana untuk membangun kesepahaman tentang CU di tingkat pengurus dan staf YKSPK. Anggota inti menjadi titik yang nantinya akan mempengaruhi masyarakat lain.

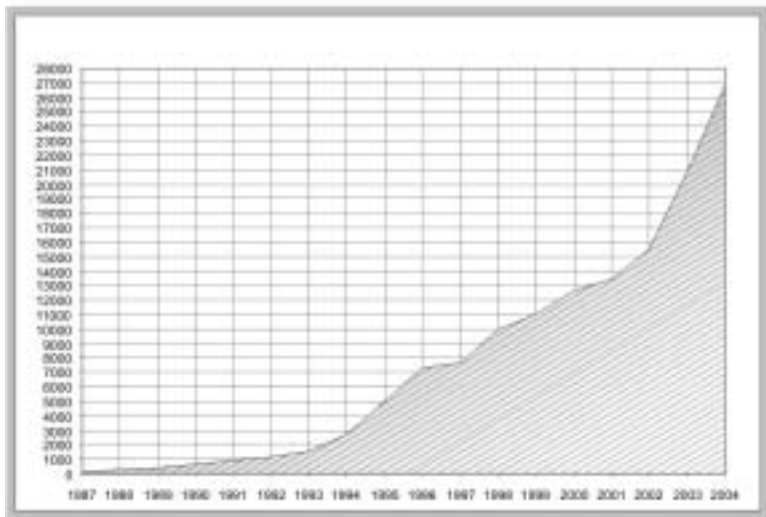
Dengan jumlah anggota sebanyak 82 orang, aset yang terkumpul sejumlah Rp. 2.651.700,-. Pelayanannya pun dimulai dari ruangan kecil di sudut sekolah YKSPK. Upaya pengembangan gerakan CU di dalam lingkungan YKSPK berlangsung hingga tahun 1992. Setahun berikutnya, pengembangan sudah mulai disebarluaskan di daerah pedesaan.

Kegiatan awal yang dilakukan, kunjungan sosialisasi yang dilakukan secara intensif. Pendekatan dilakukan dengan tokoh agama dan tokoh adat. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat di gereja dan rumah-rumah adat. Dari pertemuan tersebut secara bertahap, dipilih kader lokal yang nantinya bertanggung jawab dalam pengembangan CU di kalangan masyarakat sekitarnya.

Para kader tersebut kemudian disertakan dalam pelatihan - pelatihan dan pendampingan tentang CU yang dilakukan langsung oleh para pengurus CU Pancur Kasih. Isu yang dikembangkan pada saat sosialisasi adalah pemberdayaan masyarakat Dayak. Perlunya penyadaran kepada masyarakat Dayak tentang

pandangan pihak luar terhadap mereka sebagai suku yang miskin, pemalas, biadab, kanibal, kotor, bodoh, dan masih banyak pelabelan lainnya. Anggota lama maupun baru didoktrin supaya punya komitmen dan konsisten dengan misi yang mereka emban, yaitu mencari anggota dan menyebarluaskan informasi kegiatan ini.

Grafik perkembangan anggota CUPK



Seiring makin kompleksnya permasalahan masyarakat Dayak, sejak tahun 1993 YKSPK membentuk unit-unit kerja baru di bawah Serikat Segerak Pancur Kasih. Unit-unit tersebut antara lain LBBT, PEK, PPSDAK, SHK, BPR, KPD, ID, AMA, Mitra Kasih. Dalam kegiatannya, mereka selalu membawa isu marginalisasi masyarakat Dayak. Masing-masing unit kerja tersebut memiliki misi sendiri, tetapi di dalam setiap aktivitasnya

selalu menyertakan upaya pengembangan CU. Masing-masing program melayani beberapa daerah sehingga informasi tentang CU disebarkan juga ke berbagai desa secara lebih luas.

Isu pemberdayaan masyarakat Dayak mampu mendorong partisipasi bahkan sampai di wilayah pedesaan. Pertumbuhan anggota CU mulai pesat dari tahun ke tahun. Semakin banyak anggota, semakin besar peluang untuk menghimpun dana, dan semakin besar pula kemampuan untuk membantu sesama anggota. Seiring dengan penambahan anggota, daerah pelayanan juga semakin luas.

Untuk mempermudah pelayanan, CUPK membuka tempat pelayanan (TP) di daerah-daerah dengan memperhatikan jumlah anggota dan aset yang dihimpun. Tempat pelayanan baru dibuka dengan anggota sekitar 200 hingga 300 orang. Asetnya berkisar 300 hingga 500 juta. Sebelum TP dibuka, pembinaan intensif dilakukan dari kantor pusat, dan setelah TP beroperasi baru diserahkan pada kader lokal.

Tempat pelayanan mempunyai hak untuk menerima anggota, mengelola keuangan seperti menerima simpanan dan mencairkan pinjaman. TP mempunyai sistem pembukuan sendiri yang tetap dipertanggungjawabkan ke kantor pusat. Kader lokal bertanggung jawab mengembangkan daerah pelayanannya supaya tempat berkembang. TP juga dapat membentuk tim kerja baik untuk pengembangan wilayah, mengatasi pinjaman macet atau keperluan lain yang dianggap perlu.

Sampai pertengahan tahun 2004, sudah

*Isu pemberdayaan
masyarakat Dayak
mampu
mendorong
partisipasi bahkan
sampai di wilayah
pedesaan*

dibuka 13 tempat pelayanan yang tersebar di wilayah Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Landak, kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas. Keanggotaan yang sebelumnya hanya untuk masyarakat Dayak, berkembang menjadi masyarakat Kalimantan Barat secara luas.

Keberhasilan pembangunan solidaritas masyarakat kemudian dikembangkan ke arah pembangunan solidaritas masyarakat Kalimantan Barat. Artinya, CU dapat dijadikan sebagai sarana untuk rekonsiliasi. Sejak tahun 2000 keanggotaan CUPK lebih terbuka. Tidak membedakan suku, agama, ras maupun golongan. Siapapun yang merasa terpinggirkan, sadar tentang perlunya membangun solidaritas, dan ada keinginan berkembang melalui kemandirian, dapat bergabung dengan CUPK.

2. PERAN MASING-MASING AKTOR DALAM IMPLEMENTASI

Pelaksanaan kegiatan dan pengembangan kredit union dilakukan oleh staf dan pengurus Pancur Kasih sebagai kesatuan unit kerja. Kegiatan implementasi terkonsentrasi pada kegiatan sosialisasi dan pembinaan terhadap manfaat serta tujuan kegiatan berdasarkan rencana kerja yang sudah disusun bersama.

Kegiatan yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan antara lain pelatihan para kader dan fasilitator di tingkat desa. Para kader bertindak sebagai pengembang CU. Sementara para anggota mengikuti pendidikan dasar keanggotaan untuk yang baru menjadi anggota CU serta pendidikan dasar lanjutan bagi para

*Keberhasilan
pembangunan
solidaritas
masyarakat
kemudian
dikembangkan ke
arah
pembangunan
solidaritas
masyarakat
Kalimantan Barat*

anggota yang cenderung tidak aktif. Sedangkan untuk pelaksanaan operasional kegiatan CU berupa administrasi simpan pinjam.

Peran BK3D sebagai lembaga yang berwenang menilai dan mengawasi berbagai kegiatan CU di Kalimantan lebih berperan dalam proses koordinasi perkembangan dan pertumbuhan CU-CU yang ada, termasuk CUPK. Fungsi dan peran tersebut tidak secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan CUPK.

Kemudian pemerintah, melalui dinas koperasi, masih sebatas pengadaan legalitas kegiatan pada 1993. CU Pancur Kasih disahkan berbadan hukum dalam bentuk Koperasi Kredit. Perkembangan yang pesat dengan manajemen organisasi yang baik menjadikan CUPK sebagai koperasi berprestasi dari pemerintah pada 1999 dan 2000.

Bentuk pengakuan pemerintah daerah terhadap keberhasilan CUPK juga bisa dilihat dari seringnya studi banding di CUPK atas rekomendasi Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Barat. Secara tidak langsung, pemerintah daerah sudah mengakui bahwa contoh praktek terbaik koperasi saat ini seperti yang sudah dilakukan oleh CUPK.

*Perkembangan
yang pesat dengan
manajemen
organisasi yang
baik menjadikan
CUPK sebagai
koperasi berprestasi dari
pemerintah pada
1999 dan 2000*

3. DAMPAK KEGIATAN

3.a. Pembangunan daerah

Berdasarkan pengajuan pinjaman anggota dibagi 3 jenis, yaitu pinjaman produktif, pinjaman konsumtif, dan pinjaman darurat. Pada awal berdiri, 70% pinjaman digunakan untuk konsumtif. Tetapi, saat ini kondisinya

berbalik. Pinjaman produktif mencapai 61%, kemudian sekitar 37% untuk pinjaman konsumtif, dan 2% pinjaman darurat.

Perubahan struktur pinjaman ini mengindikasikan perubahan pola hidup anggota dari konsumtif ke produktif. Indikasi lainnya, ada perbaikan kondisi ekonomi dengan tingkat pendapatan yang relatif membaik sehingga kebutuhan konsumtif sudah bisa terpenuhi.

CU Pancur Kasih merupakan kekuatan ekonomi rakyat dengan jumlah anggota lebih dari 26 ribu orang dan aset puluhan miliar. Dalam waktu yang relatif singkat sudah mampu menghimpun dana dari masyarakat miskin yang tinggal di pedesaan. Keberadaan CU Pancur Kasih telah membuka jalan bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya.



KANTOR PUSAT: Gedung kantor pusat CU Pancur Kasih di Pontianak.

Berbagai usaha yang digeluti anggotanya merupakan dampak dari kemudahan permodalan yang diperoleh dari CU. Usaha yang dikelola oleh anggota telah membuka kesempatan kerja bagi pemiliknya, anggota keluarga, dan mungkin juga orang lain. Dengan prosedur yang mudah, murah, dan cepat membuat banyak pengusaha dan petani kecil menjadikan CU sebagai sumber pembiayaan pengembangan usaha.

Secara langsung, kontribusi pada pendapatan asli daerah mungkin belum tampak. Namun dalam pembangunan, khususnya sumber daya manusia di bidang koperasi, nilainya cukup besar. Dengan biaya swadaya Rp 15.000 setiap anggota CU mempunyai kontribusi pengembangan diri sebagai wujud keswadayaan dalam setiap pelatihan.

Tabel perkembangan CU Pancur Kasih sejak tahun 1987–2003

Tahun	Anggota	Simpanan Saham	Pinjaman	SHU	Asset
1987	82	2.179.250	2.548.600	174.950	2.657.700
1988	258	18.429.030	18.497.610	2.305.230	20.736.760
1989	446	53.786.435	59.108.310	8.473.490	62.776.498
1990	604	123.128.545	146.890.075	22.691.650	152.567.695
1991	931	193.363.280	242.240.025	42.060.025	252.784.147
1992	1.209	322.808.215	380.219.300	60.547.618	400.136.883
1993	1.554	540.529.055	586.190.675	88.429.979	644.363.909
1994	2.647	999.622.205	1.145.863.050	153.427.708	1.220.976.711
1995	4.978	2.112.685.615	2.946.688.475	390.934.326	3.063.719.442
1996	7.309	3.132.058.420	3.614.301.700	570.322.956	4.177.742.153
1997	7.659	3.514.544.955	4.192.844.725	536.112.114	4.622.017.023
1998	9.953	5.766.059.210	5.564.466.050	777.506.114	6.891.456.981
1999	10.982	7.315.290.785	5.987.911.000	1.022.493.452	9.538.563.433
2000	12.628	10.207.120.210	11.837.429.050	1.518.775.263	14.767.800.271
2001	13.422	12.492.331.910	17.156.021.910	2.127.030.941	22.138.867.459
2002	15.422	20.321.925.860	71.425.449.825	3.277.251.382	33.830.872.749
2003	20.909	36.138.422.285	49.025.870.500	5.705.830.445	63.672.224.100

Sumber: CUPK pemberdayaan ekonomi rakyat melalui simpan-pinjam oleh Oktavianus Kamusi,SH.

Jumlah anggota CU yang mencapai 20.000 orang telah mendapatkan pendidikan dasar koperasi. Artinya, secara akumulatif biaya pelatihan yang telah dikeluarkan tidak kurang dari Rp.300.000.000. Kontribusi yang tidak sedikit bagi pengembangan kelompok masyarakat di mana umumnya biaya tersebut masih dibebankan kepada pemerintah daerah setempat.

CU Pancur Kasih menjadi aset daerah sebagai contoh sukses keswadayaan anggota dan pengembangan kegiatan melalui pendidikan dan penyadaran. Kegiatan ini mendorong partisipasi yang sangat aktif dari para anggotanya. Hampir setiap tahun, ada saja yang melakukan studi banding ke CUPK, mulai dari pulau Sumatera hingga Papua. AR Mecer sebagai inisiator CUPK sering diminta menjadi narasumber tentang kiat-kiat pengembangan kegiatan ini. Untuk membagi pengalaman, PEK Pancur Kasih memfasilitasi pembentukan dan pembinaan terhadap CU-CU yang baru tumbuh.

Di Kalimantan Barat, melalui program PEK sudah dibentuk 12 CU sebagai replikasi CUPK. Permintaan untuk memfasilitasi pembentukan dan pembinaan CU datang dari berbagai penjuru tanah air. Ada yang dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Mentawai-Pulau Nias, Ambon, Papua, Yogyakarta, dan Timor Leste.

3.b. Kesejahteraan masyarakat

”Jika ingin maju, jadilah anggota CU.” Begitulah motto yang kini berkembang di

*CU Pancur Kasih
menjadi aset
daerah sebagai
contoh sukses
keswadayaan
anggota dan
pengembangan
kegiatan melalui
pendidikan dan
penyadaran*

CU merupakan solusi bagi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang ada di pedesaan bahkan pinggiran kota

kalangan masyarakat Dayak sekarang. Bahasa promosi ini dicetuskan oleh anggota yang merasa sudah mendapatkan manfaat sebagai anggota CU. Sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang menghimpun modal, CU merupakan solusi bagi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang ada di pedesaan bahkan pinggiran kota.

Sebab, lembaga perbankan kurang memberi perhatian terhadap kredit mikro. Ini bukan lahan profit karena tidak efisien dari segi pembiayaan. Marjinalisasi dari lembaga keuangan tersebut semakin menyadarkan kelompok mikro untuk memperkuat modal sendiri.

Melalui CU, berbagai kebutuhan anggota dapat dipenuhi seperti modal usaha, perbaikan rumah, kepemilikan kendaraan, biaya pendidikan anak sampai biaya perobatan. Anggota CU yang ingin memiliki kendaraan lebih baik mengambil kredit di CU untuk membeli motor secara kas, ketimbang harus membeli kredit kepada dealer/agen. Bunga di CU relatif rendah dan pada akhir tahun bisa mendapatkan balas jasa pinjaman.

Sebelumnya, banyak pengusaha di kampung membeli barang ke toko dengan cara kredit. Konsekuensinya mereka menjadi terikat, harga barang pun menjadi lebih tinggi karena harga hasil bumi yang mereka jual ke toko dibeli dengan harga rendah. Dengan meminjam ke CU, mereka bebas membeli barang dagangan dan bebas menjual hasil buminya. Posisi tawar mereka jauh lebih baik dan imbasnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB 4

BERDAYAKAN PEMIMPIN AGAMA DAN TOKOH ADAT

PERKEMBANGAN CU Pancur Kasih banyak melibatkan banyak pihak, dari kalangan masyarakat, LSM, Gereja, maupun pemerintah. Pada tahun 1985, Biro Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Agung Pontianak (PSE-KAP) bekerja sama dengan Badan Koordinasi Keperasi Kredit Indonesia (BK3I) mengadakan pelatihan tentang Credit Union (CU) di Pontianak. Pelatihan tersebut diikuti oleh beberapa orang aktivis YKSPK.

Hasilnya, mereka mendirikan CU Katulistiwa Bakti (CUKB) sebagai laboratorium CU. Sebagian besar pengurus dan karyawan YKSPK menjadi anggotanya. CUKB dijadikan sebagai proses belajar bagi aktivis YKSPK dalam mendalami sistematika dan manajemen pendirian, pengembangan, dan operasional sebuah CU.

YKSPK sebagai lembaga pengembang CU Pancur Kasih melakukan semua tahapan kegiatan pendirian CU. Diawali pengembangan gagasan di dalam lingkungan yayasan hingga pengembangan kegiatan di kalangan masyarakat. Berbagai kegiatan tersebut sepe-nuhnya dilakukan oleh YKSPK. Tidak adanya dukungan atau bentuk kerja sama dengan pihak lain menyebabkan awal perkembangan kegiatan berjalan lambat.

Pengembangan keanggotaan di pedesaan awalnya mengalami hambatan karena masyarakat masih trauma serta semangat kebersamaan yang sudah luntur. Untuk memobilisasi masyarakat, dilakukan pendekatan dengan tokoh agama dan tokoh adat. Kader-kader lokal dibina dan didampingi untuk

kemudian berperan aktif menyebarkan informasi tentang CU. Sekarang ini justru masyarakat yang berinisiatif mengadakan pertemuan sosialisasi dan mengundang pengurus CU sebagai narasumber.

Badan Koordinasi Koperasi Kredit Daerah (BK3D) Kalimantan secara rutin dan konsisten mendampingi CU, terutama dalam penerapan standar pedoman umum pengelolaan koperasi kredit. Di bawah koordinasi BK3D, diadakan produk bersama seperti asuransi pinjaman dan silang pinjam antar CU. Hubungan CU di daerah tidak lepas dari gerakan CU se-Indonesia (BK3I), se-Asia (ACCU), dan CU sedunia (WOCCU). Gerakan tersebut secara langsung maupun tidak langsung menjadi motivasi bagi insan CU di daerah.

Peran pemerintah melalui Kantor Wilayah Depkop dan PKK Provinsi Kalimantan Barat merupakan instansi teknis yang berwenang mengeluarkan Akte Badan Hukum. Berdasarkan permohonan pengurus CUPK, pada 1993 dikeluarkan BH No. 32/Kep/KWKK.14/IX/ 1993. Dengan keluarnya status hukum tersebut, keberadaan CUPK diakui secara resmi oleh pemerintah.

CU Pancur Kasih merupakan bukti bahwa lembaga yang bergerak untuk mengembangkan masyarakat dapat berkembang baik dengan adanya dukungan proporsional dari pemerintah tanpa harus ada bentuk-bentuk intervensi langsung. CUPK merupakan salah satu koperasi ditunjuk oleh Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Barat sebagai tempat studi banding.

Sekarang ini justru masyarakat yang berinisiatif mengadakan pertemuan sosialisasi dan mengundang pengurus CU sebagai narasumber

Penghargaan sebagai koperasi tersehat juga diterima dari Pemerintah RI. Pengakuan ini sebagai bukti bahwa CUPK merupakan koperasi yang baik dan patut dicontoh. Kekuatan koperasi terletak pada anggotanya, baik itu menyangkut kuantitas maupun kualitasnya. Semakin banyak anggota koperasi, semakin besar peluang untuk dapat mengumpulkan dana dalam jumlah banyak serta semakin banyak juga peluang masyarakat yang dapat menikmati manfaat koperasi.

Saat ini, sebagian besar anggota CU Pancur Kasih memiliki kecenderungan untuk terlibat aktif dan bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan CU Pancur Kasih. Ini dapat dilihat dari aktivitasnya menyimpan, membayarkan iuran, menghadiri RAT, memberi masukan, dan informasi mempromosikan serta mencari anggota baru. Peran aktif ini masih perlu ditingkatkan mengingat masih ada sebagian kecil anggota yang masih belum memahami manfaat keanggotaannya dalam CU Pancur Kasih.

*Penghargaan
sebagai koperasi
tersehat juga
diterima dari
Pemerintah RI*

I. HAMBATAN DAN STRATEGI PENYELESAIAN

Dalam masyarakat masih berkembang kebiasaan pesta yang disertai dengan hiburan, judi, dan minum-minuman. Kebiasaan ini menyebabkan etos kerja menjadi rendah, terutama di kalangan kaum pria. Imbasnya, kaum wanita yang harus bekerja keras mencari nafkah untuk keluarga.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, para pengurus CU melakukan pendekatan personal

dan melalui tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Pendekatan dan penyadaran tumbuh dengan sendirinya setelah masyarakat menyadari tindakan yang salah dan yang benar. Kesadaran itu mengarahkan masyarakat untuk menjadi anggota CU Pancur Kasih. Mereka kemudian mengikuti pendidikan dasar mengenai CU dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan menumbuhkan partisipasi.

Dalam masyarakat Dayak juga belum semuanya bisa menerima yang namanya CU. Apalagi lembaga itu dikelola orang-orang yang tinggal di Pontianak, jauh dari desa. Selain itu, mereka juga belum terbiasa mengeluarkan uang untuk menabung. Uang yang dimiliki selalu kurang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Kegiatan penyadaran masyarakat dilakukan dengan pendekatan perorangan yang diikuti dengan pembentukan kader-kader lokal di tingkat lingkungan masyarakat setempat melalui pendidikan. Hasil yang dirasakan beberapa anggota mulai menarik masyarakat untuk turut menjadi anggota.

Pada tahun-tahun awal, modal di CUPK memang masih terbatas. Jumlah dan simpanan anggota baru sedikit. Tapi sekarang, anggota tidak perlu khawatir bakal kekurangan dana. Bekerja dengan sistem jaringan telah meningkatkan kapasitas permodalan.

Tidak hanya itu. Awalnya, CUPK terkendala problem penguatan organisasi. Prinsip-prinsip CU belum diterapkan dengan baik dan konsisten. Begitu juga dengan pendidikan. Akibatnya, tak sedikit anggota

Mereka kemudian mengikuti pendidikan dasar mengenai CU dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan menumbuhkan partisipasi

yang melalaikan kewajiban seperti menyimpan secara rutin. Untuk mengatasi masalah ini, CUPK lebih menggiatkan kegiatan pembinaan dan pendidikan anggota.

Dengan kesadaran terhadap pentingnya peran aktif anggota dalam pengembangan sebuah lembaga simpan- pinjam membuat CUPK lebih menitikberatkan proses pengembangan usaha pada peningkatan kualitas anggota, terutama pengetahuan tentang CU.



MULAI TERBUKA: CU Pancur Kasih yang dulunya identik dengan Suku Dayak kini mulai terbuka menerima anggota masyarakat umum.

BAB 5

BUKAN LAGI MILIK MASYARAKAT DAYAK

I. PERMASALAHAN KINI DAN NANTI

PEMBANGUNAN ekonomi masyarakat Dayak, khususnya dalam permodalan, sampai sekarang dibangun melalui gerakan CU. Melalui perkembangan CU Pancur Kasih, masyarakat Dayak yang dulunya dianggap miskin, kini telah mampu menghimpun dana hingga Rp 97,9 miliar.

Keberlanjutan kegiatan CUPK dipengaruhi oleh 4 faktor: (1) siklus pertumbuhan, perkembangan, dan penurunan produk; (2) isu keanggotaan yang mulai berubah, dari pemberdayaan masyarakat Dayak ke masyarakat umum; (3) kebijakan pemerintah yang tak kondusif bisa menghambat kinerja CU; (4) penyakit sosial masyarakat.

Sebagaimana lazimnya daur hidup, perkembangan CUPK bisa saja mencapai titik jenuh pada suatu saat nanti. Siklus ini sangat sulit dihindari karena mungkin terjadi di mana dan kapan saja. Berdasarkan grafik, saat ini kondisi posisi masih pada pertumbuhan yang cukup tajam.

Namun, untuk mengantisipasi kejenuhan, perlu dilakukan berbagai inovasi baik dari sisi produk maupun manajemen. Perbaikan yang ada diharapkan dapat mempertahankan peningkatan seperti selama ini.

Pandangan anggota di pedesaan yang fanatik masih beranggapan CUPK milik masyarakat Dayak. Hal ini terjadi karena pada waktu awal mereka masuk menjadi anggota sudah didoktrin: CUPK merupakan gerakan masyarakat Dayak dalam rangka membangun solidaritas. Sampai sekarang pun anggota di

pedesaan menjadi anggota CUKP, salah satunya, karena doktrin tersebut. Nilai universal merupakan ciri dalam gerakan CU sehingga CUPK juga harus memperhatikan nilai tersebut.

Di kalangan pengurus, orientasi mulai mengarahkan sebagai alat rekonsiliasi dengan menerapkan nilai universal bagi keanggotaannya. Dengan demikian keanggotaan terbuka untuk semua golongan. Kebijakan harus didukung dengan sosialisasi yang baik. Jika sebaliknya, kebijakan tersebut dapat menjadi perusak kepercayaan dan solidaritas yang selama ini telah dijalin di antara para anggota.

Namun, jika dilakukan dengan tepat, kebijakan ini dapat menjadi upaya pembauran dan penyetaraan posisi masyarakat Dayak dalam masyarakat luas. Upaya tersebut dilakukan dengan sosialisasi-rekonsiliasi kepada anggota melalui pertemuan-pertemuan maupun pelatihan. Ini dimaksudkan supaya ada perasaan senasib sepenanggungan sehingga menumbuhkan rasa solidaritas di kalangan anggota.

Supaya bisa bertahan, CUPK harus konsisten dalam memberi perlindungan kepada anggota, tidak birokratis, mengutamakan pelayanan bagi anggota, transparan, memberdayakan seluruh anggota, dan terbuka bagi siapapun yang ingin bergabung. Supaya dapat memberi pelayanan yang lebih baik kepada anggota, perlu juga dilakukan penerapan teknologi tepat guna dan modernisasi sesuai dengan nilai-nilai positif dari luar yang bisa diterapkan dalam manajemen.

*Nilai universal
merupakan ciri
dalam gerakan CU
sehingga CUPK
juga harus
memperhatikan
nilai tersebut*

Masuknya berbagai budaya luar harus diantisipasi karena bisa menghilangkan atau mengurangi nilai-nilai tradisional yang menjadi senjata pergerakan CU selama ini. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu pendidikan, solidaritas, dan keswadayaan. Pertumbuhan anggota saat ini cukup pesat dan sangat mungkin mengalami stagnan penambahan.

Karena itu perlu ditingkatkan kualitas dengan menumbuhkan kesadaran dan partisipasinya. Perbaikan kualitas anggota hanya dapat dilakukan dengan pendidikan yang tiada henti. Belajar berkoperasi harus sejak lahir, karena itu CUPK tidak membatasi keanggotaan dari umur keluarga.

2. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN DARI PEMERINTAH

Koperasi merupakan bentuk usaha ekonomi yang diharapkan menjadi sokoguru perekonomian di republik ini. Seiring berubahnya kebijakan pemerintah di bidang perkoperasian sebagai landasan hukum, itu dapat mempengaruhi keberlanjutan CU. Misalnya, jika hal-hal prinsip dari kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip CU, ini akan mengganggu keberlanjutan, membatasi ruang gerak, dan konsistensi CU.

Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah, terutama menyangkut pengeluaran kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan koperasi.

Kerja sama masyarakat dalam bentuk koperasi kredit merupakan bentuk partisipasi

Perbaikan kualitas anggota hanya dapat dilakukan dengan pendidikan yang tiada henti

dalam pembangunan, terutama bagi kalangan anggotanya. Kebijakan pemerintah hendaknya berpihak dan mendukung aktivitas tersebut. Pemerintah melalui instansi teknis tidak boleh hanya menjadikan sekadar objek untuk popularitas atau mendapatkan keuntungan. Tapi hendaknya memberi dukungan pengembangan secara langsung maupun tidak langsung.

Matriks Keterlibatan Para Aktor:

Tahapan	Masyarakat/ lokal leader	YKSPK	BK3D	SSPK	Pemerintah
Identifikasi masalah		•			
Intropeksi		•			
Munculnya gagasan		•			
Perencanaa strategi	•	•			
Informasi Input	•	•	•		
Sumber Daya	•	•			
Implementasi	•	•		•	
Kerjasama	•	•	•	•	
Dukungan	•	•		•	
Munculnya dampak	•	•			•
Monitoring	•	•	•		•
Perluasan	•			•	

Matrik Kronologis Pengembangan CU Pancor Kasih

Tahun	Aktor	Proses Inisiasi	Strategi perencanaan	Mobilisasi		Implementasi	Monitoring dan evaluasi	
				Sumber daya	Partisipasi		Ham-batan	Solusi
	A R Mecer	Penguatan ekonomi masyarakat Dayak	Menso-sialisasiide dengan teman pengurus YPKSK					
	YKSPK	Akomidir dan fasilitasi	Menyusun draf dan konsep AD	Aktivis dan staf YKSPK		Mendiri-kan CU Pancur Kasih	Anggota terbatas	Promosi kepada masyarakat luas
	Anggota		Pengem-bangan keang-gotaan	Masya-rakat Dayak	Simpanan dan pembiayaan yang ditetapkan		Pengeta-huan anggota tentang koperasi masih rendah	Pendidikan yang kontinu
	BK3D				Kerjasama permodalan antar CU	Melakukan gerakan pengembangan CU		
	Serikat Segerak Pancur Kasih		Menyebar-kan infor-masi ke kampung-kampung	Staf lapangan		Melakukan penyuluhan tentang CU	Masih banyak kampung sulit dijakng-kau pelaya-nan	Membuka TP di beberapa lokasi
	Dinas Koperasi					Memberi badan hukum kepada CU		



Contact Person

Oktavianus Kamusi

Manajer CU Pancur Kasih
0561-881951

Drs. Maran Marcellinus Aseng

Ketua Badan pengawas
0561-881952

Drs. F.Y. Khosmas, MSI

Ketua CU Pancur Kasih
0561-881953

Dra. Noberta Yeti

Direktur Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
0561-883075

LAMPIRAN I: Profil RDPLG Project

Dukungan JICA bagi Pembangunan Daerah dalam era Otonomi Daerah melalui Proyek Kerjasama Teknis Kebijakan Pembangunan Daerah untuk Pemerintah Daerah (RDPLG Project)

Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir ini (April 2001 – Maret 2005), JICA dan Pemerintah Indonesia telah melakukan serangkaian prakarsa untuk mendukung pembangunan daerah di era otonomi daerah, melalui proyek kerjasama teknis kebijakan pembangunan daerah untuk pemerintah daerah (RDPLG Project). Kerjasama teknis RDPLG Project diselenggarakan bersama Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah-Departemen Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Barat, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi se Sulawesi.

Tujuan proyek kebijakan pembangunan daerah untuk pemerintah daerah (RDPLG Project) adalah :

1. Peningkatan kapasitas manajemen perencanaan pembangunan daerah
2. Peningkatan kualitas aparat (sumberdaya manusia) pemerintah pusat dan daerah
3. Promosi kerjasama antar pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pembangunan daerah
4. Promosi kerjasama antar stakeholder dalam rangka peningkatan pembangunan daerah
5. Promosi program pembangunan daerah

Kegiatan utama proyek yang dilakukan meliputi :

1. Penerbitan series Buku Teks Pembangunan Daerah yang terdiri dari 7 Buku Teks, 20 Modul Utama dan 1 Summary Modul (berisi 50 kasus) Praktek Sukses Pembangunan Lokal
2. Pilot Project Promosi Pertanian Organik di Kalimantan Barat
3. Pilot Project Pembangunan Daerah melalui Pengembangan Sutera Alam dan Industri Sutera di Sulawesi Selatan
4. Pilot Project Pembangunan Agrowisata di Sumatera Utara
5. Pilot Project Kerjasama Antar Tiga Propinsi Melalui Pengembangan Jeruk

LAMPIRAN 2: JICA Team & Counterpart

KANTOR JICA INDONESIA

Mr. Hiroyoshi Ihara	Mantan Resident Representative
Mr. Keiichi Kato	Resident Representative
Mr. Takaaki Oiwa	Mantan Deputy Resident Representative
	Deputy Resident Representative
Mr. Takashi Tsuji	Deputy Resident Representative
Mr. Nobuhiko Hanazato	Mantan Assistant Resident Representative
Mr. Tsutomu Tanaka	Asisten Resident Representative
	Asisten Resident Representative
Mr. Daisuke Ueda	Staff
Mr. Kazuyoshi Kuroda	
Ms. Ervina Martha	

PROYEK RDPLG/JICA

Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Mr. Nobuhisa Takeda	Mantan Advisor
Mr. Hisao Tanimoto	Chief Advisor & Team Leader
Ms. Ida Gosal	Mantan Asisten
Ms. Hurriah	Asisten
Ms. Nirwana Anar	Asisten
Mr. Mitsuhiro Kataoka	Peserta Pelatihan, JICA IFTC
Mr. Masanobu Kasimura	Peserta Pelatihan, JICA Tokyo

BAPPEDA SUMATRA UTARA

Mr. Yasunori Minagawa	Advisor
Mr. Indra Kurniawan	Asisten
Ms. Fairy Wulandari	Sekretaris

BAPPEDA KALIMANTAN BARAT

Mr. Noboru Fujimoto	Advisor
Ms. Diana Butar Butar	Asisten
Ms. Lucky Hartanti	Sekretaris

BAPPEDA SULAWESI SELATAN

Mr. Masaaki Okamoto	Mantan Advisor
Mr. Hiroyuki Sakuma	Advisor
Mr. Henky Widjaya	Mantan Asisten
Mr. Ilham Djamaluddin	Asisten
Ms. Riseria Ada'	Asisten

TENAGA AHLI JANGKA PENDEK UNTUK PRAKTEK BERHASIL

Mr. Kazuhisa Matsui	Institute Ekonomi Pembangunan
Mrs. Noriko Inozume	Institut Pembangunan Daerah
Ms. Hiroko Urashima	Local Junction 21 (NPO)
Ms. Motoko Shimagami	Universitas Kyoto, Pst Graduate Course

PROYEK HRDLG/JICA

Mr. Masayoshi Enomoto	Advisor
Mr. Takero Kawabata	Koordinator
Mr. Naoyuki Shintani	Advisor
Mr. Msashiko Suginaga	Advisor
Mr. Kousuke Nakajima	Advisor

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Mr. Seman Widjoyo, MSi	Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Mr. Soemarsono, MDM	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Mr. Lukman Nul Hakim	Kepala Bagian Perencanaan

Anggota Tim

Mr. Gunawan, MA	Kepala Sub Direktorat Potensi dan Pertumbuhan Perkotaan
Mr. Bambang Suliantoro, Dipl. DM	Kepala Sub Direktorat Perencanaan Wilayah II
Mr. Eka Atmaja Baskara H, MURP	Kepala Sub Direktorat Wilayah Tertinggal

Ms. Dyah Indrajati, MSc.	Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pemanfaatan & Pengendalian Sumber Daya Alam
Ms. Tjutju Hendrawati	Kepala Sub Direktorat Promosi Ekonomi Daerah
Mr. Tavip Rubianto, MT.	Kepala Sub Bagian Evaluasi Program
Mr. Roosdina	Kasi Wilayah I Subdit Kerjasama Pembangunan Wilayah
Ms. St. Zuchriaty, MA	Kasi Kemitraan Subdit Kerjasama Pembangunan Perkotaan
Mr. Zamzani B. Tjenreng	Staf Bagian Perencanaan
Mr. Budi D. Sinulingga	Bappeda Sumatera Utara Kepala Bappeda Sumatera Utara

BAPPEDA KALIMANTAN BARAT

Mr. I Nyoman Sudana	Kepala Bappeda Kalimantan Barat
Mr. Memet Agustiar	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kalimantan Barat

BAPPEDA SULAWESI SELATAN

Dr. H. S. Ruslan, SE	Kepala Bappeda Sulawesi Selatan
Dra. A. Inda Siraju, MSi	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

JPIP

Mr. Redhi Setiadi	Editor
-------------------	--------

CESS

Mr. Mangara Tambunan	Direktur Pelaksana
Mr. Andi Ikhwan	Peneliti
Mr. Ubaidillah	Peneliti
Ms. Purri Andriaty	Asisten Peneliti

Japan International Cooperation Agency (JICA) adalah badan resmi Pemerintah Jepang dengan tugas utama melaksanakan kerjasama teknis ke negara berkembang dalam bentuk hibah. JICA memperluas kerjasama teknisnya dengan memperhatikan tiga pilar utama yaitu mempromosikan partisipasi masyarakat, penguatan bantuan untuk penciptaan perdamaian dan meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Pada tahun 2004, penguatan program difokuskan pada reformasi struktur perekonomian untuk pemulihan, good government, peningkatan prasarana industri, pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan dan konservasi lingkungan hidup.

Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) Departemen Dalam Negeri dengan fungsi dan tugas membina seluruh rangkaian kegiatan pembangunan di daerah, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi hasil-hasilnya. Dengan misi "Terwujudnya kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara serasi, professional dan berkelanjutan", Ditjen Bina Bangda mendorong dan memfasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan, pengembangan potensi ekonomi dan penataan pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan daerah. Otonomi daerah menempatkan Ditjen Bina Bangda untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan pembangunan daerah dan keserasian pembangunan antar daerah.

Center for Economic and Social Studies (CESS) adalah lembaga independen di bidang penelitian dan pengkajian, didirikan tahun 1994 dan berorientasi pada kebijakan public. CESS bertujuan menyumbang ide dan pemikiran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kegiatan penelitian, pelatihan, penyebaran informasi serta kerjasama dengan pihak yang terkait dengan pembangunan social ekonomi. Sesuai dengan tujuan dan didukung dengan SDM yang berkualitas, CESS memberi perhatian pada bidang social ekonomi meliputi usaha kecil dan menengah, kemiskinan, desentralisasi dan pembangunan daerah, perdagangan domestik dan internasional dan pengembangan SDM. Email: cess@indosat.net.id

Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) adalah lembaga independen yang secara intensif melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Lembaga ini didirikan oleh Jawa Pos Group pada 1 April 2001 di Surabaya. Tepatnya tiga bulan setelah otonomi daerah resmi diberlakukan. Sebagai lembaga yang concern pada kemajuan pelaksanaan otonomi daerah, JPIP selalu mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi pada ranah pengembangan ekonomi, pelayanan publik, dan minimalisasi risiko politik lokal. Tiga parameter inilah yang secara konsisten digunakan untuk menilai kemajuan pelaksanaan otonomi daerah, khususnya di Jawa Timur. Setiap tahun, kepada kabupaten dan kota yang memiliki kinerja terbaik pada tiga parameter tersebut diberikan apresiasi tertinggi berupa Otonomi Award. Email: otonomi@jpip.or.id